

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Sampang

Rina Nur Azizah^{1*}, Sosesilo Zauhar², M. Saleh Soeaidy³

¹Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Abstrak

Pengangguran di negara Indonesia merupakan permasalahan yang sulit dihilangkan dari kehidupan manusia, akan tetapi permasalahan pengangguran tidak dibiarkan begitu saja. Tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja serta tingkat pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki masyarakat Indonesia sangat rendah. Penelitian ini memberikan gambaran tentang pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sampang sekaligus menemukan faktor pendukung dan faktor penghambat. Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui pelayanan publik dengan anggaran APBN dimana jenis kegiatan meliputi Teknologi Tepat Guna (TTG), Padat Karya dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang bertujuan untuk mengupayakan ketersediaan kesempatan kerja disektor informal bagi para pencari kerja melalui pembentukan kelompok usaha kecil dengan memanfaatkan potensi lokal yang tersedia. Fokus kegiatan ini adalah memfasilitasi pelayanan program kegiatan pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu tahap seleksi lokasi, sosialisasi pemberdayaan masyarakat, proses pemberdayaan masyarakat, pemandirian masyarakat, monitoring dan evaluasi. Hasil yang dicapai dari keseluruhan program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mampu mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sampang lebih kurang 3%. Faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi angka pengangguran adalah : faktor pendukung meliputi ketersediaan anggaran APBN, adanya komitmen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, adanya semangat kebersamaan dan gotong royong, adanya pihak lain seperti UPT BLK Kabupaten Sumenep. Sedangkan faktor penghambat meliputi lemahnya koordinasi kerja, kurang optimalnya sosialisasi dan kurangnya tenaga pendamping/fasilitator.

Kata Kunci : Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Pengangguran

Abstract

Unemployment in Indonesia is a problem which is difficult to be erased from human life, but this does not mean the problem of unemployment unpunished. The high level of unemployment is caused by several factors, including the size of the labor force that is not balanced with available job, the low of education levels and skills of Indonesian people. This study provides an overview of community empowerment in reducing number of unemployment in Sampang Regency while finding the supporting and obstacle factors. Based on the results of discussion of this study, its concludes that community empowerment programs are conducted through the state public service with the Indonesian Budget in which these types of activities include Teknologi Tepat Guna (TTG), Padat karya and Tenaga Kerja Mandiri (TKM) which aims to pursue the availability of informal sector job opportunities for job seekers through the establishment small business groups to exploit the potential of locally available. Focus of this activity is to facilitate the community empowerment service program. These community empowerment programs are implemented by several stages that are : selection stage of location, socialization community empowerment, community empowerment process, the independence of society, monitoring and evaluation. The outcome of the overall community empowerment programs conducted by the Social, Manpower and Transmigration Departement to reduce number of unemployment in Sampang Regency less than 3%. Enabling and obstacle factors in empowering community to reduce number of unemployment are : contributing factors involve the availability of the Indonesian Budget, the commitment of Social, Manpower and Transmigration Departement, the great spirit of togetherness and mutual assistance, the presence of other parties such as the UPT BLK Sumenep Regency. Meanwhile obstacle factors include the lack of coordination, lack of optimal socialization and lack of facilitator.

Keywords: Public Service, Community Empowerment, Unemployment

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat di era globalisasi seperti sekarang ini menjadi bagian penting

karena merupakan solusi dalam menyelesaikan permasalahan pengangguran di Indonesia. Menurut Suhendra bahwa masyarakat yang semakin berdaya, disadari maupun tidak, akan meningkatkan produktifitas karena pada hakekatnya setiap individu akan mengambil bagian secara aktif dalam pembangunan[1].

Alamat Korespondensi Penulis:

Rina Nur Azizah

Email : Rina_Nurazizah@yahoo.co.id

Alamat : Jl. Mayjen Haryono, No. 168 Malang 65145

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat masih dirasakan menyimpang dari yang seharusnya, terdapat bias yang terjadi pada pemberdayaan masyarakat[1]. Jadi sasaran penerima kegiatan di pedesaan adalah orang atau kelompok yang telah menerima kegiatan yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Bisa dikatakan bahwa sebenarnya proyek tersebut kurang berhasil tetapi tetap dilakukan ditahun berikutnya.

Peran serta masyarakat dapat dijadikan alternatif untuk meminimasi ketidakpuasan masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, selain itu meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam bernegara dan bermasyarakat menurut Chesterman (1992) dalam [1]. Keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat menjadi alat monitoring dan evaluasi bagi pemerintah untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan benar. Demi tercapainya keberhasilan pemberdayaan masyarakat segala program perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi harus melibatkan masyarakat karena mereka yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka mengurangi pengangguran sebab mereka nantinya yang memanfaatkan dan menilai tentang keberhasilan atau tidaknya pemberdayaan masyarakat.

Di negara Indonesia pengangguran adalah permasalahan yang ada sejak peradaban manusia lahir karena kehadirannya merupakan sebuah kondisi diluar kesejahteraan. Oleh karena itu pengangguran adalah suatu hal yang sulit dihilangkan dari kehidupan umat manusia. Akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa permasalahan pengangguran dibiarkan begitu saja, karena pengangguran adalah sumber dari masalah sosial lainnya. Tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja serta tingkat pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Permasalah tentang kesempatan kerja menjadi semakin penting karena pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat daripada pertumbuhan kesempatan kerja yang tersedia, artinya jumlah tenaga kerja yang diserap oleh lapangan kerja semakin sedikit. Akibatnya tingkat pengangguran semakin meningkat.

Di Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat didunia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2013 jumlah angkatan kerja di Indonesia bertambah

sebanyak 3,1 juta orang dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 780 ribu orang, sedangkan penduduk yang bekerja pada tahun 2013 bertambah sebanyak 3,2 juta orang dibandingkan dengan tahun 2012 bertambah sebanyak 1,2 juta orang. Sementara, jumlah penganggur pada tahun 2013 mengalami penurunan sebanyak 440 ribu orang dibandingkan dengan keadaan tahun 2012[2]. Meskipun jumlah angkatan kerja bertambah, tetapi dalam satu tahun terakhir terjadi penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAP) sebanyak 0,45%. Sebagaimana perkembangan yang terjadi pada skala Nasional, angka pengangguran di Kabupaten Sampang mengalami peningkatan. Berdasarkan data BPS di Kabupaten Sampang pada tahun 2013 menunjukkan penduduk Kabupaten Sampang tercatat sebesar 871.534 jiwa. Sedangkan jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sampang pada tahun 2013 adalah 783 orang, namun jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan pada lapangan kerja yang tersedia sebanyak 272 orang.

Pemberdayaan masyarakat saat ini menjadi istilah yang berkembang dalam dimensi ilmu administrasi, juga berkembang dengan berbagai konsep, Kabupaten Sampang merupakan salah satu Kabupaten di Pulau Madura yang mengalami kesenjangan sosial ekonomi akibat perbedaan pendapatan masyarakat, oleh karena itu pemerintah berupaya untuk mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sampang dengan berbagai program seperti PNPM Mandiri, Program UMKM, P2KP, PPKH ataupun program pemberdayaan lainnya. Akan tetapi dengan kegiatan program tersebut jumlah pengangguran di Kabupaten Sampang setiap tahunnya belum ada penurunan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di setiap tahunnya maka Pemerintah Provinsi melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sampang berupaya untuk mengurangi angka pengangguran dengan kegiatan program Pemberdayaan Masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk Teknologi Tepat Guna (TTG), Padat Karya dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM).

Penelitian ini membahas dan menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sampang berdasarkan karakteristik individu, diantaranya umur, pendidikan dan jenis kelamin. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa jumlah penganggur dalam memilih pekerjaan

dipengaruhi dengan program pelatihan pemberdayaan masyarakat.

Sasaran atau penerima program pemberdayaan masyarakat ini adalah para penganggur yang merupakan cukup dalam usia kerja yang berada pada lokasi terpilih. Fokus utama dalam program ini adalah dalam hal pelatihan yang terdiri dari kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG), Padat Karya dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Tujuannya adalah dapat mengembangkan ketrampilannya dalam bentuk menciptakan lapangan kerja sendiri terutama dalam hal mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sampang. Berdasarkan uraian di atas tersebut dianggap perlu untuk melakukan penelitian terkait dengan apa yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat dilokasi penelitian. Sehubungan dengan proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ditempatnya.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini dilakukan perumusan masalah yaitu bagaimana proses program pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sampang?. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang proses program pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sampang dengan mempertimbangkan kebutuhan program kegiatan dengan memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana dan anggaran yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan ini peneliti dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses dan pencarian yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah dan apa adanya.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumen. Metode observasi dilakukan dengan melihat secara langsung proses penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat. Metode wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan instansi terkait pemberdayaan masyarakat dan peserta pemberdayaan masyarakat. Metode dokumen digunakan dengan melihat dokumen data pengangguran di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Rencana Kerja dan laporan penyelenggaraan program

pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sampang tahun 2013.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data Milles dan Humberman adalah “metode analisis data yang terdiri dari 3 alur kegiatan, yaitu : Kondensasi data, penyajian data, menarik kesimpulan/verifikasi [3]. Kondensasi data dilakukan dengan cara Kondensasi data merupakan suatu analisis data yang merujuk pada proses penelitian, fokus penelitian, menyederhanakan, abstrak dan mengubah data lengkap dari catatan yang diperoleh dari lapangan, serta wawancara yang dilakukan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sampang maupun di lapangan. Berbeda dengan reduksi data yang sifatnya lemah, kondensasi data merupakan analisis yang membuat data lebih kuat. Data yang diperoleh di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan yang diperoleh di lapangan dikumpulkan dan disusun dalam pola hubungan sehingga mudah dipahami. Dengan penyajian data, peneliti memahami atas masalah apa yang sedang dihadapi oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Langkah ketiga adalah menarik kesimpulan. Dengan tersedia data yang diperoleh peneliti baik dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun di lapangan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dengan didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, sehingga kesimpulan yang dikemukakan oleh peneliti merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Sampang

Model pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan program Teknologi Tepat Guna (TTG), Padat Karya dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) adalah model *people center development* karena dalam model ini, pembangunan kualitas manusia adalah upaya meningkatkan kapasitas manusia untuk mempengaruhi dan mengatur masa depannya[4].

1. Teknologi Tepat Guna (TTG)

Power sebagai kemampuan untuk merubah kondisi masa depan melalui tindakan pengambilan keputusan serta upaya masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dalam

merubah kondisi masa depan[5], melalui Keputusan Presiden RI Nomor 1642 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Kabupaten Sampang turut ambil bagian dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas angkatan kerja dengan memanfaatkan seluruh potensi dan sumber daya pendidikan serta terapan teknologi yang ada di pedesaan dalam bentuk mengadakan Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang langsung menyentuh kepada masyarakat dengan tujuan peningkatan pengetahuan, kemampuan, produktivitas dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sebagai bekal dalam menghadapi dunia kerja dengan diadakannya program Teknologi Tepat Guna (TTG). Program ini adalah salah satu alternatif untuk mengatasi masalah pengangguran di Kabupaten Sampang. Kegiatan ini harus berpotensi memenuhi beberapa kriteria yaitu sumber daya alam yang digunakan harus tersedia dan tepat, menyerap tenaga kerja dan memacu industri rumah tangga serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sesuai dengan wawancara Bapak Teguh selaku Kepala Bidang Ketenaga Kerjaan, menyatakan bahwa :

Program ini dikembangkan untuk memberikan masyarakat yang mempunyai kemampuan minim, tidak bekerja (pengangguran) dan berasal dari keluarga miskin serta para Eks tenaga kerja Indonesia yang bermasalah agar mereka mampu mengembangkan diri sebagai warga yang cerdas, produktif, kompetitif dan berdampak pada distribusi terhadap penurunan pengangguran dan kemiskinan. (Wawancara tanggal 14 Juli 2014)

Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah proses kegiatan alih teknologi sederhana untuk mengolah bahan baku menjadi bahan jadi, sehingga mampu memberikan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja dan menyerap tenaga kerja. Lingkup kegiatan program ini berorientasi pada peningkatan produktivitas dan kualitas unggulan daerah. Padat Karya

a. Padat Karya Produktif

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Sampang maka semakin banyak usia produksi yang mendongkrak pasar dunia, namun kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karena minimnya lapangan pekerjaan. Kabupaten Sampang melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengambil langkah untuk mengurangi angka

pengangguran dengan adanya program padat karya. Ada dua kegiatan program padat karya yaitu padat karya produktif dan padat karya infrastruktur. Melalui program ini diharapkan dapat menumbuhkembangkan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk dikelola sehingga dapat berpotensi dalam mengembangkan perekonomian kerakyatan di pedesaan sehingga mampu mengurangi arus urbanisasi.

Melalui wawancara yang dilakukan dengan Bapak Teguh selaku Kasi Tenaga Kerja, mengemukakan bahwa:

Program padat karya baik padat karya produktif maupun padat karya infrastruktur adalah program yang diberlakukan Pemerintah melalui anggaran APBN untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Program ini mempunyai banyak keuntungan jika kita berhasil dalam menghadapi tantangan. Jadi jika bukan kita yang mendukung siapa lagi?. Kita sebagai bangsa Indonesia juga baiknya mendukung dengan ikut berperan aktif dalam program padat karya. (Wawancara tanggal 23 Juli 2014).

Berdasarkan penelitiannya yang berjudul *Empowerment as an Approach For Community Development in Malaysia* Pemberdayaan melalui partisipasi merupakan proses yang berkesinambungan dimana orang mengembangkan dan menggunakan kemampuan mereka untuk bertindak dalam menanggapi masalah bersama dan untuk mencapai kebutuhan yang diharapkan dalam upaya untuk membawa beberapa perubahan pada kehidupan masyarakat[6]. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang menjadikan orang yang lebih berdaya dalam menyelesaikan masalahnya sendiri maka kegiatan padat karya memberikan kewenangan dan kepercayaan dalam mendorong seseorang untuk terlibat dalam pembuatan keputusan[7].

2. Padat Karya Infrastruktur

Padat karya infrastruktur memiliki tujuan mengembangkan semangat kogotongroyongan masyarakat, dapat mengembangkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa serta meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana fisik pedesaan yang berkelanjutan, adapun stakeholder didalamnya adalah para pemuda dan seluruh tokoh di masyarakat tersebut. Secara umum pelaksanaan ini dimulai dari kegiatan sosialisasi tentang program padat karya infrastruktur di tingkat Kabupaten Sampang

yang dihadiri oleh para Camat. Setelah itu, Camat mensosialisasikan padat karya infrastruktur kepada para Kepala Desa. Selanjutnya aparat desa yang didampingi Satuan Pelaksana (Satlak) dari LKMD membuat proposal program yang diajukan kepada Kecamatan untuk disampaikan kepada Pemerintah melalui TKPP. Alokasi dana APBN dalam bentuk pengadaan material non lokal diarahkan untuk pengadaan material, seperti semen dan aspal. Sedangkan dalam bentuk swadaya masyarakat penerima program dilakukan konversi atas kontribusi tenaga dan penyediaan lahan dalam bentuk uang rupiah secara tunai. Terbukanya akses jalan secara lebih baik di Pedesaan berdampak pada kelancaran transportasi lokal, yang secara tidak langsung pula membuka peluang bagi semakin meningkatnya akses ekonomi lokal.

3. Tenaga Kerja mandiri (TKM)

Dalam penelitiannya yang berjudul *Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Upaya Mengatasi Pengangguran* menyebutkan bahwa Usaha kecil Menengah (UKM) dapat mengatasi masalah ketenaga kerjaan dan terutama dalam mengatasi pengangguran, dengan mendirikan usaha sendiri dapat memainkan peran dalam mengatasi persoalan ketenaga kerjaan, peran yang dilakukan cukup penting, walaupun penyerapan tenaga kerja nampak masih kurang teramati. Meskipun diketahui bahwa serapan tenaga kerja dalam membuka lapangan usaha sendiri sangat kecil per unitnya, akan tetapi akumulasinya menunjukkan bahwa sektor ini pantas diberdayakan guna mengatasi pengangguran. Untuk itu dibutuhkan suatu perhatian dan kebijaksanaan dari pemerintah secara nyata dalam memaksimalkan pemberdayaan sektor infrastruktur, agar kendala yang dihadapi sektor ini dapat dihilangkan dan pada akhirnya pengangguran akut yang dapat mengakibatkan krisis sosial dapat dicegah dan dapat diatasi [8].

Melalui wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ludfi Staf Nakertrans menjelaskan bahwa : Program pemberdayaan masyarakat melalui Tenaga Kerja Mandiri (TKM) adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara profesional yang dimana Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sampang bekerjasama dengan UPT BLK Kabupaten Sumenep, beserta Pondok pesantren di Kabupaten Sampang, sehingga memperoleh hasil yang cukup baik dan bermanfaat bagi masyarakat pengangguran yang berdomisili di Pedesaan. (Wawancara tanggal 16 Juli 2014)

Satu cara untuk mengurangi angka pengangguran adalah pemberian latihan kerja secara institutional berupa ketrampilan dasar bagi tenaga kerja yang tidak memiliki ketrampilan [9], maka dalam kegiatan TKM para penganggur diberikan pelatihan ketrampilan mengenai teknologi baru yang akan digunakan agar tenaga kerja tidak mengalami gagap teknologi. Tenaga Kerja Mandiri adalah pemberdayaan masyarakat penganggur, setelah menganggur dan pencari kerja melalui pelatihan dan bantuan sarana usaha sebagai stimulan kegiatan wirausaha. Dengan kerjasama yang dilakukan dengan UPT BLK Kabupaten Sumenep beserta Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sampang ada beberapa kegiatan TKM adalah pelatihan pembuatan tahu/tempe, pelatihan pembuatan krupuk udang, pelatihan menjahit, pelatihan membordil, pelatihan service sepeda motor. Tujuan dari Tenaga Kerja Mandiri (TKM) itu sendiri memberikan bekal pengetahuan ketrampilan serta menumbuhkan sikap kewirausahaan pada pencari kerja melalui pengembangan kewirausahaan. Penganggur sebaiknya memiliki ciri-ciri dan watak wirausaha, diantaranya sebagai berikut: (1). Percaya diri; (2). Berorientasi pada tugas dan hasil; (3). Pengambilan resiko; (4). Kepemimpinan; (5) Keorisinilan; (6). Berorientasi ke masa depan [10].

Sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Sampang

Di dalam buku pedoman pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sampang menyebutkan bahwa sasaran dari kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah :

1. Masyarakat

Kelompok sasaran penerima manfaat pemberdayaan masyarakat adalah warga masyarakat yang menganggur sesuai dengan kriteria pengangguran setempat yang disepakati oleh warga, termasuk di dalamnya adalah masyarakat yang telah lama menganggur yang penghasilannya merosot dan tidak berarti akibat inflasi serta kehilangan sumber nafkahnya karena krisis ekonomi dan lain-lain.

Sesuai dengan wawancara Bapak Teguh selaku Kasi Nakertrans menjelaskan bahwa :

Dalam penentuan sasaran penerima kegiatan program pemberdayaan masyarakat adalah dengan menentukan warga masyarakat yang menganggur/tidak memiliki pekerjaan serta yang tidak memiliki ketrampilan sehingga

dibina dan diberi pelatihan guna dalam kesejahteraan perekonomian dalam rumah tangganya. (wawancara tanggal 23 Juli 2014).

2. Proses penetapan lokasi sasaran

Lokasi sasaran kegiatan program pemberdayaan masyarakat sebanyak 14 wilayah kecamatan yang diseleksi dan ditentukan beberapa kelurahan saja setiap kecamatannya. Penetapan lokasi sasaran program ini adalah kelurahan yang memiliki masyarakat penganggur yang cukup banyak dan kondisi kelurahan yang masih belum sejahtera dalam kehidupan perekonomiannya sehingga sangat penting untuk mendapatkan program pemberdayaan masyarakat ini.

Penentuan sasaran program kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah dengan cara penentuan peserta kegiatan yang dianggap menganggur dan tidak memiliki ketrampilan sehingga dapat tercapai kesejahteraan ekonominya, selain itu sasaran selanjutnya adalah dalam penentuan lokasi wilayah kelurahan yaitu ditentukan beberapa wilayah kelurahan yang dianggap banyak penduduk yang menganggur dan dilihat dari kondisi wilayah kelurahan yang belum sejahtera dalam kehidupan perekonomiannya.

Pemberdayaan merupakan suatu kuasa, maka pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mempengaruhi atau mengontrol manusia selaku individu atau kelompok, sehingga sasaran utamanya adalah penganggur yang mempunyai cukup usia kerja dalam lokasi terpilih pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat[11]. Dalam hal ini program pemberdayaan masyarakat harus diawali menciptakan iklim dan potensi masyarakat yang dapat dikembangkan. Titik tolaknya adalah pengenalan wilayah yang memiliki sumberdaya yang diperlukan dalam kegiatan pemberdayaan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya karena jika demikian maka masyarakat tersebut sudah punah. Dengan demikian maka pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk membangun daya atau potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya sehingga orang atau masyarakat menjadi berdaya, lepas dari ketergantungan, kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan[12].

Tahapan Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Sampang

Tahapan yang dilakukan dalam program pemberdayaan masyarakat antara lain adalah:

1. Seleksi Lokasi

Seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Penetapan kriteria penting agar pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat akan tercapai seperti yang diharapkan. Sebelum melakukan kegiatan, seleksi lokasi perlu memperoleh kesepakatan antara Tim Fasilitator, Aparat Pemerintah setempat, masyarakat (perwakilan) setempat, dan pemangku kepentingan yang lain. (pelaku Bisnis, tokoh masyarakat, aktifis LSM, akademisi, dll.). Hal ini tidak saja untuk menghindari gesekan atau konflik kepentingan antar semua pemangku kepentingan, tetapi juga membangun sinergi dan memperoleh dukungan berupa partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan, demi keberhasilan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan.

2. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat

Sosialisasi, merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait dengan program dan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Proses sosialisasi menjadi sangat penting, karena akan menentukan minat atau ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi (berperan dan terlibat) dalam program pemberdayaan masyarakat yang dikomunikasikan.

3. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut maka bersama-sama melakukan hal-hal tersebut:

- a. Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan serta peluang-peluangnya. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi dan menganalisa keadaannya, baik potensi maupun permasalahannya.
- b. Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajiannya. Yang meliputi : Memprioritaskan dan menganalisa masalah-

masalah, Identifikasi alternatif pemecahan masalah yang terbaik, Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah, Pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaannya, Menerapkan rencana kegiatan kelompok, memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif (partisipatif, monitoring dan evaluasi). Pemandirian Masyarakat.

4. Pemandirian Masyarakat

Berpegang pada prinsip pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya, maka arah pemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya. Proses pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan eksternal. Proses pemberdayaan masyarakat mestinya juga didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multi disiplin. Tim pendamping ini merupakan salah satu faktor eksternal dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tim pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri.

5. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi adalah pengamatan dan pengkajian atas kegiatan pendampingan yang telah dijalankan guna mengetahui perkembangan – perkembangan yang terjadi dan hasil-hasil yang telah dicapai. Monitoring dan evaluasi menjadi bagian penting dalam kegiatan pendampingan. Melalui monitoring dan evaluasi, kita dapat melakukan refleksi, guna memperoleh informasi penting seputar pelaksanaan kegiatan, seperti :

- a. Realitas pelaksanaan dan perkembangan yang terjadi di lapangan;
- b. Dampak atau manfaat apa saja yang diperoleh kelompok;
- c. Dukungan berbagai pihak atas pelaksanaan kegiatan ;
- d. Permasalahan atau hambatan-hambatan yang dihadapi;
- e. Perbaikan-perbaikan yang perlu diupayakan.

Administration of government affairs, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu tindakan untuk membantu kelompok penganggur sebagai penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam skala besar untuk kepentingan publik[13]. Pada umumnya disepakati, bahwa

agar lapisan masyarakat yang diberdayakan mempunyai kemampuan merubah kondisi masa depan, dibutuhkan keterlibatannya dalam penguasaan atau kontrol terhadap sumber daya, pengelolaannya dan hasil serta manfaat yang diperoleh.

Hasil Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Sampang

Pemberdayaan masyarakat sangat bermanfaat bagi penganggur di Masyarakat Kabupaten Sampang diantaranya masyarakat yang memiliki sumberdaya yang perlu diolah, masyarakat dilingkungan pedesaan serta masyarakat di wilayah pondok pesantren. Kemampuan yang dimiliki nantinya berupa kemampuan untuk berwirausaha sendiri sehingga dengan pengalaman yang diperoleh dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan, untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan atau mengakses sumber daya dan layanan yang dipergunakan memperbaiki mutu hidupnya. Ditegaskan oleh Suharto bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses. Sebagai proses, pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian kegiatan yang bermanfaat memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah pengangguran[12]. Dengan pemahaman seperti ini, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala utilitas dari obyek yang diberdayakan. Sesuai dengan kutipan Mardikanto yang menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu atau masyarakat maka manfaat yang dari program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sampang adalah : (1) Peningkatan kesejahteraan jangka waktu panjang yang berkelanjutan. (2) Peningkatan penghasilan dan perbaikan penghidupan di masyarakat dan kelompok dengan penghasilan kecil. (3) Peningkatan penggunaan sumber-sumber pengembangan secara efektif dan efisien. (4) Program pengembangan dan pemberian pelayanan yang lebih efektif, dan efisien dan terfokus pelanggan. (5) Proses pengembangan yang lebih demokratis[14].

Program Pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sampang merupakan program pembangunan partisipatif yang menerapkan pendekatan

pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan pihak UPT BLK Kabupaten Sumenep sebagai fasilitator dan masyarakat penganggur sebagai pelaku utama pembangunan. Sejalan dengan pendapat Pearson et al, terhadap pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sampang merupakan sebuah proses dengan nama orang menjadi cukup kuat dalam berpartisipasi, berbagi pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya[15]. Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, maka hasil yang bisa diharapkan adalah sebagai berikut:

- (1) Pengembangan model pendidikan kewirausahaan yang sesuai bagi penganggur yang berada di wilayah kabupaten Sampang.
- (2) Terlaksana pelatihan kewirausahaan guna menciptakan jiwa wirausaha bagi penganggur supaya dapat menciptakan pekerjaan baru supaya memperoleh penghasilan untuk menghidupi keluarganya.
- (3) Terlaksananya pendidikan kewirausahaan dalam sebagai bekal pengalaman lapangan untuk persiapan mendirikan Wirausaha Baru (WUB) yang akan didirikan oleh penganggur.
- (4) Terbentuknya WUB yang tersebar di Kabupaten Sampang.
- (5) Dapat menginventarisir kebutuhan dan berbagai hambatan pelaksanaan pendidikan dan praktik usaha yang dilakukan untuk penyempurnaan model pendidikan kewirausahaan bagi penganggur.
- (6) Dapat melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan praktik usaha yang dilakukan sehingga menghasilkan usaha baru bagi masyarakat penganggur yang ada di Kabupaten Sampang. Sesuai dengan pendapat Nanga, pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari kerja, program pemberdayaan masyarakat mempunyai kemampuan menjadi pilar penting bagi perekonomian masyarakat dalam menghadapi pengangguran. Tentunya hal ini tidak terlepas dari kemampuan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk merespon jumlah pengangguran secara cepat dan fleksibel[16]. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah aktivitas ekonomi, sedangkan aktivitas ekonomi sendiri secara umum dapat

diindikasikan oleh tenaga kerja dan nilai tambahnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa program Pemberdayaan Masyarakat telah berhasil mengurangi angka pengangguran mencapai lebih kurang 3% dari jumlah penganggur di Tahun 2013 adalah dari jumlah pencari kerja yang mendaftar berdasarkan AK1 adalah sebanyak 783 orang, sedangkan jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan di Kabupaten Sampang adalah 272 orang, dengan demikian perlu adanya perluasan kesempatan kerja dalam kegiatan pelatihan dan ketrampilan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sampang. Dalam pelaksanaan Program pemberdayaan masyarakat hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dari 127 peserta pelaku pemberdayaan masyarakat yang kegiatannya mencakup TTG, padat karya dan TKM \pm 3% dari semua jumlah peserta yang sudah terbentuk perkembangan usaha kelompok maupun individu.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Sampang

a. Faktor Pendukung

1. Adanya anggaran melalui APBN yang disediakan oleh pemerintah dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat.
2. Adanya komitmen dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mensukseskan program pemberdayaan masyarakat.
3. Adanya semangat kebersamaan serta gotong royong yang tinggi antar peserta kegiatan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sampang.
4. Adanya keterlibatan pihak lain seperti UPT BLK Kabupaten Sumenep dalam mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, sehingga pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik.

b. Faktor Penghambat

1. Lemahnya koordinasi kerja
Sebenarnya instansi pemerintah yang terkait dengan kegiatan program pemberdayaan masyarakat cukup komprehensif, namun pola pelaksanaan tugasnya dan wewenang antar instansi belum terpadu. Selain itu untuk lingkup penyelenggaraan program ini koordinasinya belum berjalan dengan baik.

Masing-masing fasilitator bekerja apa adanya tanpa ada komunikasi yang rutin dan berkelanjutan, sehingga permasalahan tertentu tidak ada kesamaan pandangan atas kegiatan ini.

2. Kurang optimalnya sosialisasi

Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk tahapan sosialisasi belum berjalan secara efektif, karena sosialisasi dilaksanakan melalui media musyawarah. Padahal banyak media sosialisasi melalui pemberitahuan secara langsung, dalam bentuk spanduk serta memanfaatkan karang taruna sebagai media sosialisasi.

3. Kurangnya tenaga pendamping/fasilitator

Pendamping merupakan komponen pokok dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ini. Jumlah pendamping yang memadai diperlukan untuk memperlancar dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat ini. Akan tetapi masih kurangnya jumlah pendamping yang dimiliki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sampang menghambat pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Keterbatasan pendamping ini dapat dijumpai dalam kegiatan pelatihan kurangnya jumlah pendamping yang membimbing peserta pelatihan.

KESIMPULAN

Dalam memahami proses pemberdayaan secara lebih proporsional, dirumuskan *power* sebagai kemampuan untuk merubah kondisi masa depan melalui tindakan pengambilan keputusan. Pembangunan itu sendiri dapat ditafsirkan sebagai upaya membangun *power* oleh suatu masyarakat, antara lain dalam bentuk peningkatan kemampuan untuk merubah kondisi masa depan. Oleh sebab itu, suatu tindakan termasuk tindakan yang ditujukan kepada kelompok penganggur dapat disebut sebagai pemberdayaan masyarakat apabila melalui tindakan itu dapat berdampak pada peningkatan kemampuan kelompok penganggur untuk merubah kondisi masa depannya. Melalui anggaran APBN pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sampang telah berjalan sesuai dengan proses yang telah ditetapkan yaitu dengan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat tersebut terdapat beberapa jenis kegiatan, yaitu kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG), Padat Karya dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang bertujuan untuk

mengupayakan tersedianya kesempatan kerja di sektor informal bagi para pencari kerja melalui pembentukan kelompok usaha kecil atau usaha mandiri dengan memanfaatkan potensi lokal yang tersedia. Fokus kegiatan ini adalah memfasilitasi pelayanan program kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yakni tahap seleksi lokasi, sosialisasi pemberdayaan masyarakat, proses pemberdayaan masyarakat, pemandirian masyarakat, monitoring dan evaluasi. Akan tetapi didalamnya masih perlu dilakukan penyempurnaan terlihat bahwa dengan sosialisasi yang dilakukan hanya mengundang beberapa orang saja sebagai perwakilan. Pembinaan yang dilakukan bagi kegiatan ini diharapkan dapat menjadi program ini sebagai acuan bagi program pemberdayaan masyarakat dikemudian hari. Dalam program pemberdayaan masyarakat ini tidak lepas dari campur tangan pendamping, yang tugasnya sebagai fasilitator dalam membimbing masyarakat di lapangan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten sampang sangat bermanfaat untuk mengubah perilaku penganggur, baik pengetahuannya maupun sikapnya. Usaha produktif yang dilakukan oleh beberapa kelompok juga membuka kesempatan kerja bagi penganggur. Selain itu pemberdayaan masyarakat juga menekankan partisipasi masyarakat untuk menemukan masalahnya sendiri, mengatasi dengan program kerja yang sesuai dengan mengatur penyelenggaraan untuk keberlanjutannya sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sampang. Sasaran pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat pada kelompok penganggur sebagai bagian dari masyarakat yang membutuhkan penanganan tersendiri dari pihak pemerintah selaku penentu kebijakan publik yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya yang mereka miliki yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan pendapatan/profit usaha sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap penerima pendapatan daerah. Hasil yang dicapai dari keseluruhan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat mampu mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sampang lebih kurang 3% dari jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Sampang. Dengan berjalannya program ini semoga jumlah prosentasi disetiap tahunnya meningkat.

SARAN

1. Perlu koordinasi yang belum berhasil dapat diatasi dengan mendatangi tempat dimana kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan. dan Transmigrasi dan UPT BLK Kabupaten Sumenep harus ada keterpaduan antara pola pelaksanaan tugasnya dan wewenang instansinya. Masing-masing pendamping juga harus menjalin komunikasi yang rutin dan berkelanjutan, sehingga permasalahan tertentu tidak ada kesamaan pandangan atas kegiatan tersebut.
2. Perlunya proses sosialisasi yang lebih mendalam, sehingga masyarakat dapat mengenali masalah sesuai dengan kebutuhannya.
3. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat maka diperlukan jumlah pendamping yang maksimal pula.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sampang beserta jajarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Suhendra, K, Peran Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat, Bandung: Alfabeta, 2006.
- [2] BPS Kabupaten Sampang, "Jumlah Penduduk di Kabupaten Sampang," BPS, Kabupaten Sampang, 2013.
- [3] Matthew B. Milles., and A. Michael Humberman., *Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook*, Amerika: Arizona State University, 2013.
- [4] Suryono, Agus & Nugroho, Trilaksono, *Paradigma, Model Pendekatan Pembangunan, & Pamberdayaan masyarakat di Era Otonomi Daerah*, Malang: FIA - UNIBRAW, 2007.
- [5] Korten, David C., *Pembangunan yang memihak rakyat*, Jakarta: Yayasan Studi Pembangunan, 1984.
- [6] Samah, A. Asnarulkahdi, and Aref Fariborz, "Empowerment as an Approach For Community Development in Malaysia," *International Journal of Academic Reseach in Bussiness and Social Sciences*, vol. 2, no. 8, pp. 1-6, 2012.
- [7] Wibowo, *Manajemen Kinerja*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- [8] Sihono, Teguh, "Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Upaya Mengatasi Pengangguran," *Jurnal Economia*, vol. I, no. 1, pp. 1-85, 2005.
- [9] Suroto, *Strategi Pembangunan & Perencanaan Kesempatan Kerja*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.
- [10] Meredith., and Geoffrey G., *Kewirausahaan : Teori dan Praktek. Seri Manajemen No. 97*, Jakarta: Pustaka Binaman Prestindo, 1992.
- [11] Dahl, Robert., *Democracy And Its Critics*, Yale University Press: New Haven Conn, 1983.
- [12] Kartasmita, Ginanjar., *Administrasi Pembangunan*, Jakarta : LP3S: Administrasi Pembangunan, 1997.
- [13] Fesler, J.W., *Public Administration : Theory and Practice*, Inc: Englewood Cliff, NJ : Prentice-Hall, 1980.
- [14] Soeharto, E., *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- [15] Parsosns, Ruth J., James S. Jorgenses., and Santos H. Hernandez, *The Integration of Social Work Practice.*, California: Brooks/Cole, 1994.
- [16] Nanga, Muana, *Makro Ekonomi. Teori, Masalah, Kebijakan. Edisi Kedua*, Jakarta: PT. Raja GrafiKa Persada, 2005.
- [17] Mardikanto, Totok & Sutamii, S.T., *Prosedur Penyuluhan Penelitian Pembangunan*, Surakarta: Theresia Pressindo, 2001.